

ANALISIS STRATEGIS PADA RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KECAMATAN BETOAMبارI KOTA BAUBAU

Oleh: Asis Musi

Asis Musi, 2015. "Analysis of the strategy of Batoambari Kota Baru Subdistrict Government strategic plan". Slamet Riyadi University, Thesis, unpublished.

The government of Betoambari Sub District as a Local Apparatus Work Unit of Baubau City has devised some strategies poured into Renstra (Strategic Plan) of 2013-2018 to help to realize the vision of Baubau Mayor and to establish annual performance including strategic targets as specified in the achievement of target indicator specified in the annual performance stipulation of Betoambari Sub District Government particularly in 2013 that in reality has not achieved the maximum target with the successfully gain category of 78.23%. For that reason, the measure taken to accomplish the strategic plan of Betoambari Sub District government in the form of analysis on the Betoambari Sub District's strategic management-based Strategic Plan based on internal and external environment to identify strength, weakness, opportunity, and threat of Betoambari Sub District government becomes a must to do as the development of alternative strategic issues in establishing the annual performance strategy of Betoambari Sub District. The establishment of annual performance strategy existing in Strategic Plan so far focused only on the stakeholders' perspective while the focus on internal analysis of business process (the improvement of internal organization capacity) has not been the main indicator of performance. The objective of research was to analyze the strategic plan of Betoambari Sub District of Bau-bau City. The theory employed was Bryson's theory on strategic planning for social organization, while the technique of analysis employed in this research was Wahyudi's matrix SWOT analysis concerning the combination of matrix-cross strategy, to find out and to establish the appropriate choice of strategy for determining the annual performance strategic target of Betoambari Sub District government. This research provided an alternative strategic formulation the government of Betoambari Sub District can develop in determining the strategic target of annual performance in strategic plan period: (1) intensifying the existing potency, (2) preparing adequate Human Resource and infrastructure in supporting the achievement of governmental duties, (3) enacting the mental character building, discipline, job motivation, and employees' conception on their main duty and function, and (4) encouraging the community's ability/participation and independency in contributing actively to the governmental organizing process.

Keyword: *Strategic plan, annual performance strategy, matrix-cross strategy.*

Pendahuluan

Dampak reformasi yang terjadi di Indonesia ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan adalah terjadinya pergeseran paradigma dan sistem pemerintahan yang bercorak monolistik sentralistik di pemerintah pusat kearah sistem pemerintahan yang desentralistik (*local democracy*) pada pemerintahan di daerah (Utomo, 2004). Keseriusan perubahan diantaranya ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 (merupakan revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999)

tentang Pemerintah Daerah. Ini merupakan tonggak dimulainya otonomi daerah yang merupakan cerminan dari sistim desentralisasi yang akan membuka wadah demokrasi bagi masyarakat lokal untuk berperan serta menentukan nasibnya serta berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui pemerintahan daerah yang terpercaya, terbuka, jujur serta bersikap tidak mengelak tanggung jawab (*passing the buck*) sebagai prasyarat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan mampu memenuhi asaa kepatutan dalam pemerintahan.

Pelaksanaan otonomi daerah melahirkan perubahan yang sangat radikal dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten dan kota di Indonesia. Pemerintah kabupaten dan kota kini memiliki kewenangan yang amat luas disemua bidang kecuali politik luar luar negeri, pertahanan keamanan (Hamkan), peradilan, moneter dan fiscal serta agama. Adapun bidang dan jenis kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom untuk diatur dan diurus sendiri, terdiri dari 4 (empat) kategori tugas dan kewenangan, menurut Harian Media Indonesia tanggal 10 Desember 2001 dalam Saragih (2003) yaitu: *pertama*, tugas dan kewenangan yang sesuai dengan jenis daerah otonom tersebut; *kedua*, tugas dan kewenangan pelayanan publik yang harus ditangani; *ketiga*, tugas dan kewenangan yang dari segi efisiensi lebih tepat ditangani; *keempat*, tugas dan kewenangan yang bersifat pilihan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan daerah serta permasalahan darurat yang dihadapi oleh daerah yang bersangkutan.

Kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan pengaturan pemerintahan secara sentralistis dan seragam tidak lagi dilanjutkan. Kabupaten dan kota sebagai daerah otonom selanjutnya memiliki kewenangan yang besar dan nyata dalam proses penyelenggaraan politik dan pemerintahan. Otonomi daerah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengaktualisasikan diri dalam segala potensi terbaiknya secara optimal. Dengan pengertian ini tentu memberikan pandangan bahwa setiap daerah niscaya memiliki satu atau beberapa keunggulan relatif tertentu terhadap daerah-daerah lainnya. Bahkan dilihat dari segi potensinya keunggulan tersebut bisa bersifat mutlak, misalnya yang berasal dari aspek sumber anugerah (*endowment factor*), pemerintahan, pemberdayaan masyarakat ataupun faktor lainnya yang menjadi keunggulan dari daerah yang bersangkutan.

Pemberlakuan otonomi daerah telah menawarkan perubahan fungsi utama pemerintah daerah, yang semula sebagai promotor pembangunan menjadi pelayan masyarakat. Perubahan tersebut akan mengubah bentuk, susunan, kedudukan, fungsi kelembagaan pemerintah daerah baik unsur staf, unsur lini teknis, unsur lembaga teknis maupun unsur lini ke wilayah. Salah satu unsur yang sangat berperan disini (tanpa menyepelekan unsur lainnya) yaitu unsur lini ke wilayah, dalam hal ini pemerintahan yang ada ditingkat kecamatan.

Upaya mewujudkan kedudukan dan peran kecamatan serta pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi dari camat sebagai wujud implikasi tuntutan pelaksanaan otonomi daerah telah membawa perubahan mendasar terhadap kedudukan dan peran pemerintah kecamatan yang semula kecamatan sebagai wilayah administrasi

pemerintahan yang berarti pula bahwa camat bukan lagi Kepala wilayah yang mempresentasikan wakil pemerintah Pusat ditingkat paling bawah sebagai penguasa Tunggal dibidang pemerintahan dalam wilayahnya berubah menjadi wilayah kecamatan hanyalah merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota, dengan demikian Camat tidak lagi memiliki kewenangan atributif tetapi hanya memiliki kewenangan delegatif yang berasal dari pendelegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi tingkatannya.

Pemerintah Kota Baubau telah mengantisipasi lewat dikeluarkannya Peraturan Daerah yang bertujuan mendukung sistem pemerintahan yang ada ditingkat kecamatan sebagai unsur lini kewilayahan, peraturan daerah inilah yang nantinya dijadikan pedoman acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas, kedudukan, wewenang dan fungsi dari Pemerintah Kecamatan dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat melalui Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi dan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Baubau Nomor 44 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum adalah sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelimpahan kewenangan Walikota Baubau di Kecamatan.

Tugas Pemerintah Kecamatan adalah membantu Walikota Baubau dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota Baubau sesuai bidang tugasnya, serta melaksanakan tugas pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota Baubau untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan tersebut di atas sangatlah dibutuhkan peran strategi pemerintah kecamatan sebagai lembaga teknis pemerintahan yang ada diwilayah kecamatan yang kompeten dalam memberikan pelayanan yang prima dan professional kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan norma-norma budaya daerah yang berlaku dalam melayani masyarakat dengan transparan, akuntabel dan partisipatif untuk mendukung terwujudnya visi Kota Baubau yang Maju, Sejahtera dan Berbudaya tahun 2013-2018.

Perencanaan kota Baubau yang dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018 telah menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahun pemerintahan daerah maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau (SKPD), dimana Kecamatan Betoambari sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah kota Baubau telah melaksanakan strategi-strategi yang dituangkan dalam Rencana Strategi tahun 2013-2018 sebagai jalan dari pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi RPJMD kota Baubau tahun 2013-2018, yang dirumuskan dalam 3 (tiga) poin

strategi yaitu memantapkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur serta membangun kemitraan koordiatif, integratif, sinkronisasi dan sinergitas dilingkungan pemerintah kecamatan Betoambari. Strategi tersebut ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja tahunan yang ada dalam Renstra kecamatan Betoambari tahun 2013 yang memiliki focus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang focus pada internal bussines proses (Peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan indikator kinerja utama.

Menurut laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Betoambari tahun 2013 terungkap bahwa target capaian keberhasilan dalam mencapai sasaran strategi tersebut di atas dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja kecamatan Betoambari tahun 2013 dengan realisasinya belum mencapai target maksimal yaitu $70 < X \leq 85$ (rencana capaian) dengan kategori capaian berhasil yaitu 78,23%. Langkah-langkah penyempurnaan kinerja kantor kecamatan Betoambari kota Baubau senantiasa menjadi prioritas agar terwujud akuntabilitas, untuk itu diperlukan peran aktif masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan pra survey yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei tahun 2014 di Kecamatan Betoambari ditemukan bahwa dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Betoambari sering menemui banyak kendala dalam pemberian pelayanan urusan pemerintahan kepada masyarakat, lambat dan birokratis serta terkesan mempersulit masyarakat. Akibatnya muncul cerita baik dan buruk dalam pelaksanaan praktik pemerintahan ditingkat kecamatan. Ketika predisposisi dan sikap aparatur pelaksana terhadap nilai dan semangat yang terkandung dalam pelaksanaan praktik pemerintahan positif, pelaksanaan praktik pemerintahan ditingkat kecamatan melahirkan banyak kabar baik, berupa teladan yang dapat ditiru oleh kecamatan lainnya. Sebaliknya ketika predisposisi dan sikap aparatur pemerintah terhadap nilai dan semangat sistim pemerintah negatif yang muncul adalah pantangan. Ini adalah praktik buruk yang seharusnya dihindari dalam pelaksanaan praktik pemerintahan ditingkat kecamatan karena akan mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap pencapaian visi dan misi.

Oleh karenanya diperlukan langkah-langkah strategis yang jelas, terarah dan berdasarkan elaborasi dan analisa terhadap fakta yang ada dari penilaian lingkungan internal dan eksternal Pemerintah Kecamatan Betoambari berdasarkan asumsi yang dibangun dari kerangka pikir manajemen strategik, yang dapat dijadikan pegangan bagi agen pelaksana (Pemerintah Kecamatan Betoambari) untuk menghindari terjadinya berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan praktik pemerintahan dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah kecamatan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Menurut Widodo (2000:15), metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap obyek penelitian pada suatu saat tertentu. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 1988:63). Menurut Whitney dalam Nazir (1998: 63). Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.

Penelitian dilaksanakan di Pemerintah Kecamatan Betoambari Kota Baubau karena pemerintah kecamatan Betoambari sebagai institusi teknis pemerintah kota Baubau yang secara langsung bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pelayanan urusan pemerintahan kepada masyarakat ditingkat kecamatan pada prakteknya sering menemui banyak kendala, lambat, birokratis dan terkesan mempersulit masyarakat sehingga mempengaruhi citra organisasi pemerintah kecamatan, sementara masyarakat sangat mengharapkan pelayanan urusan pemerintahan yang prima (cepat, tepat, adil, akuntabel dan transparan) di pemerintah kecamatan Betoambari. Oleh karenanya diperlukan mengenali strategis yang tepat yang mengacu pada potensi yang tersedia (kekuatan), peluang yang ingin diraih dengan mempertinbangkan ancaman dan kelemahan disisi yang lain sehingga diharapkan akan memberikan arah dalam mewujudkan harapan masyarakat dalam bentuk visi dan misi pemerintah kecamatan.

Unit analisis yang hendak diteliti yaitu mengidentifikasi faktor-faktor internal maupun faktor-faktor eksternal pemerintah kecamatan Betoambari untuk selanjutnya dapat diketahui isu-isu yang dihadapi oleh pemerintah kecamatan Betoambari dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah kecamatan dengan menemukan strategi pemerintahan yang tepat yang akan dijalankan, diperoleh melalui suatu analisis lingkungan (Analisis SWOT) yang kemudian melahirkan Matrix SWOT, sehingga didapatkan isu-isu strategis yang selanjutnya diuji dengan menggunakan "Litmust Test" untuk mengukur derajat kestrategisannya.

Untuk mendapatkan sumber informasi yang akurat dalam penelitian ini menggunakan teknik snowballing yaitu meminta informasi kunci untuk merekomendasikan dua orang yang lain atau lebih yang dianggap menguasai dan mengalami masalah yang diteliti. Bila telah mencapai kejenuhan data atau tak ada lagi data tambahan yang bisa diperoleh dari informan maka proses pengumpulan dianggap selesai (Subagyo, 1992 : 72).

Untuk mempermudah penggalian data baik sumber dari data primer maupun data sekunder yang berkaitan dengan Strategi Pemerintahan Kecamatan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kecamatan, digunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi.

Selanjutnya analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Nazir, 1988:405).

Selanjutnya penulis juga melakukan penafsiran atau interpretasi data. Menurut Nazir (1988:437-438) bahwa *“penafsiran atau interpretasi tidak lain dari pencarian pengertian yang lebih luas tentang penemuan-penemuan. Secara umum penafsiran adalah penjelasan yang terperinci tentang arti yang sebenarnya dari materi yang dipaparkan”*.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan langkah-langkah reduksi data berupa perangkuman hal-hal pokok yang terfokus pada pola yang dicari, pengambilan kesimpulan serta verifikasi data.

Hasil Penelitian

Kecamatan Betoambari terletak dibagian selatan garis katulistiwa serta terletak pada 5°C 50- 5°C 51 lintang selatan dan 122°C 56- 122°C 61 bujur timur. Batas wilayah kecamatan Betoambari yaitu sebelah utara berbatasan dengan selat buton, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan murhum, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan batauga kabupaten buton dan sebelah barat berbatasan dengan selat buton. Kecamatan betoambari memiliki topografi yang berbukit-bikit serta memiliki luas wilayah yaitu 27,89 km² atau 12, 62% lebih luas dari kota Baubau. Labalawa merupakan kelurahan dengan wilayah terluas yakni sebesar 8,57 km², sedangkan katobengke merupakan kelurahan dengan wilayah yang terkecil yakni hanya seluas 1,42 km². Kecamatan Betoambari termasuk daerah pesisir/ tepi pantai yang meliputi kelurahan sulaa dan kelurahan katobengke serta kelurahan yang dilalui sungai/kali, yakni kelurahan waborobo.

Berdasarkan data pemerintah Kecamatan Betoambari dapat diketahui bahwa pada tahun 2012 jumlah penduduk kecamatan Betoambari mencapai 16.650 jiwa, sedangkan pada tahun 2013 meningkat menjadi 16.947 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,78. Jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah tidak diimbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk dan semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2013, dimana terlihat kelurahan Katobengke merupakan yang terpadat dengan tingkat kepadatan 5.674 jiwa per kilometer, sedangkan yang terendah yakni kelurahan labalawa yang hanya mencapai 108 jiwa per kilometer.

Kecamatan Betoambari dengan luas 2.789 hektar pada tahun 2013, sebesar 12,44% merupakan hutan Negara, pekarangan sebesar 4,73%, lahan untuk pertanian sebesar 25%. Sedangkan sisanya sebesar 57,09% digunakan untuk penggunaan yang lainnya.

Luas panen dan produksi tanaman pangan di Kecamatan Betoambari pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2012. Berdasarkan data pemerintah Kecamatan Betoambari dapat diketahui bahwa untuk tanaman jagung

dengan produksi sebesar 72,6 ton tahun 2013 mengalami peningkatan produksi sebesar 101,67% , dimana tahun 2011 tanaman jagung mencapai produksi sebesar 36,00 ton. Tanaman ubi kayu mengalami peningkatan produksi sebesar 18,52% yakni dari 243 ton tahun 2012 meningkat menjadi 288 ton tahun 2013. Hasil produksi buah-buahan yang paling menonjol pada tahun 2013 adalah pisang sebesar 114 kiuntal. Sedangkan buah-buahan yang kecil produksinya adalah buah jambu air, nenas, sawo, belimbing dan sirsak yakni masing-masing satu kintal.

Lebih lanjut data pemerintah Kecamatan Betoambari memperlihatkan bahwa komoditas perkebunan yang paling menonjol pada tahun 2013 adalah jambu mete dan kelapa dalam yang masing-masing mencapai produksi sebesar 240 ton dan 40 ton, serta keduanya mengalami peningkatan produksi bila disbanding dengan tahun sebelumnya yaitu masing-masing sebesar 383,9% dan 400%. Sementara itu tanaman coklat merupakan komoditi perkebunan yang tahun 2011 diperingkat kedua, tetapi pada tahun 2012 tergeser oleh kelapa dalam.

Jumlah populasi ternak terbesar dan yang terkecil di Kecamatan Betoambari secara umum mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Berdasarkan data pemerintah Kecamatan Betoambari dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 polulasi sapi meningkat sebesar 35,42% serta kambing mengalami peningkatan sebesar 3,97%, untuk ternak unggas semua mengalami peningkatan yaitu ayam kampung sebesar 2,25%, ayam ras meningkat sebesar 28,57%, sedangkan populasi itik /itik manila meningkat 0,48%. Untuk produksi daging sapi meningkat sebesar 80,10%, kambing mengalami peningkatan sebesar 46,95%, sementara ternak unggas produksi daging ayam kampung mengalami peningkatan sebesar 2,53%, itik/itik manila meningkat sebesar 33,52%, sementara ayam ras menurun sebesar 33,52%. Pada tahun 2012 produksi telur ayam kampung dan itik/itik manila meningkat sebesar 0,37%.

Hasil produksi perikanan pada tahun 2013 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 19,42%, dimana hasil produksi tahun 2012 sebanyak 1.1186,54 ton sedangkan pada tahun 2013 mencapai 1.417,01 ton.

Luas kawasan hutan yang telah ditetapkan di wilayah kecamatan Betoambari sebesar 2.211 ha, dimana menurut jenisnya sebagian besar diperuntukan untuk hutan lainnya yaitu sebesar 1.992 ha, hutan lindung sebesar 51 ha, dan untuk penggunaan kawasan hutan produksi biasa sebesar 168 ha.

Kegiatan industri dan perdagangan di Kecamatan Betoambari dapat diketahui dari data pemerintah kecamatan Betoambari tahun 2013 yang terdiri dari industri sedang sebanyak 5 unit dengan tenaga kerja mencapai 115 orang, industry kecil sebanyak 27 unit dengan tenaga kerja mencapai 153 orang. Untuk industri rumah tangga terdapat 72 unit dengan tenaga kerja sejumlah 119 orang. Berdasarkan jenis industri, di kecamatan Betoambari terdapat 11 industri logam dan mesin tenaga kerja sebanyak 40 orang, industri aneka sebanyak 81 dengan tenaga kerja 318 orang kemudian terdapat 5 industri kimia yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 8

orang serta industri hasil pertanian dan kehutanan sebanyak 8 dengan tenaga kerja sejumlah 20 orang.

Keseluruhan kebutuhan listrik di Kecamatan Betoambari dipenuhi oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Jumlah pelanggan dari tahun ketahun makin menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2012 jumlah pelanggan mencapai 2.686 sedangkan pada tahun 2013 meningkat menjadi 3.939 pelanggan. Sedangkan jumlah pelanggan air minum tahun 2012 sebanyak 1.069 sedangkan tahun 2013 mencapai 1.129 atau terjadi peningkatan sebesar 5.61%. Untuk kelancaran perekonomian di Kecamatan Betoambari juga didukung oleh adanya sarana perekonomian seperti tokoh berjumlah 10 dan kios/warung kelontong berjumlah 278 unit.

Transportasi, Komunikasi, Pariwisata. Perkembangan transportasi di Kecamatan Betoambari semakin menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ketahun. Berdasarkan data pemerintah kecamatan Betoambari dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 sarana transportasi di beberapa kelurahan di dominasi oleh adanya alat transportasi sepeda motor (ojek) seperti kelurahan Waborobo, Lipu, Katobengke dan kelurahan Labalawa dengan biaya pulang pergi sebesar enam ribu sampai dua puluh ribu Rupiah. Sementara untuk kelurahan Sulaa umumnya menggunakan transportasi mobil angkutan umum (mikrolet) dengan biaya pulang pergi sebesar enam ribu rupiah.

Komunikasi di kecamatan Betoambari berupa jumlah warnet dan jumlah pelanggan telepon masing-masing berjumlah 1 buah dan 134 pelanggan telepon pada tahun 2011. Sedangkan pembangunan kepariwisataan di Kecamatan Betoambari yang diarahkan pada peningkatan peran pariwisata dalam kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja serta kesempatan berusaha dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat serta penerimaan devisa bagi daerah berupa pembangunan hotel dan akomodasi lainnya. Sarana akomodasi di Kecamatan Betoambari sebanyak 3 buah yang terdiri dari 2 buah hotel, dan 1 buah bungalow, 2 buah rumah makan dan 17 warung makan.

Rencana Strategis Pemerintahan Kecamatan Betoambari.

Keberadaan Renstra pemerintah kecamatan Betoambari tahun 2013-2018 memiliki hubungan dan tidak terlepas dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Baubau 2013-2018 yang merupakan pedoman umum terhadap penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Daerah Kota Baubau termasuk pemerintah Kecamatan Betoambari sebagai satuan kerja perangkat daerah. Oleh karenanya pemerintah kecamatan Betoambari telah merencanakan strategi-strategi yang dituangkan dalam Renstra tahun 2013-2018 untuk membantu walikota Baubau dan menetapkan kinerja tahunan. Rencana strategi pemerintah kecamatan Betoambari merupakan jalan dari pelaksanaan program maupun kegiatan suatu instansi pemerintah kecamatan Betoambari yang berpedoman kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Baubau. Renstra pemerintah kecamatan Betoambari memuat visi, misi, tujuan, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai, indicator kinerja utama serta Penetapan kinerja tahunan. Adapun langkah analisis strategis pada Rencana strategis kecamatan Betoambari adalah sebagai berikut :

Identifikasi Mandat, Visi dan Misi Pemerintah Kecamatan Betoambari

Mandat merupakan sesuatu yang membicarakan keharusan, tuntutan, amanat, norma serta kerangka batasan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Mandat juga merupakan kewajiban atau fungsi yang harus dilakukan oleh organisasi. Pemerintah Kecamatan Betoambari memiliki mandat yang berasal dari Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Baubau dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Baubau Nomor 44 Tahun 2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Kota Baubau.

Mandat tersebut memosisikan Pemerintah Kecamatan Betoambari yang dipimpin oleh Camat sebagai kepala pemerintah kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Baubau dan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan tugas kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota berdasarkan peraturan peundang-undangan.

Dalam menginterpretasi terhadap apa yang diperlukan sebagai akibat dari mandat tersebut, Pemerintah Kecamatan Betoambari secara langsung maupun tidak langsung harus menyiapkan strategi pelaksanaan pemerintahan yang ada.

Dari hasil wawancara dengan sumber data primer terlihat pentingnya sistem pemerintahan di kecamatan Betoambari dan sejauhmana strategi pemerintahahn kecamatan Betoambari dalam melaksanakan renstraa memberikan kontribusi positif terhadap penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Adapun visi yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kecamatan Betoambari yang bertitik tolak dari visi pemerintah Kota Baubau yaitu **Terwujudnya Baubau yang Maju, Sejahtera dan Berbudaya tahun 2013-2018.**

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki, maka visi Kecamatan Betoambari tidak sama dengan visi camat, karena visi camat adalah visi pejabat yang memimpin suatu SKPD yang disusun pada saat dilakukan *fit and proper test* untuk menduduki jabatan. Sedangkan visi kecamatan merupakan perpaduan antara visi seorang camat dan visi perangkat kecamatan. Secara umum, dokumen perencanaan Renstra kecamatan berisikan visi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan/program kecamatan .

Adapun visi kecamatan Betoambari adalah **Terwujudnya Pemerintahan dan pelayanan prima dikecamatan Betoambari.**

Penyelenggaraan pelaksanaan tugas Pemerintahan pada tingkat Kecamatan Betoambari mengacu pada visi kecamatan Betoambari dan misi pemerintahan kota Baubau yang tercantum dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) kota Baubau Tahun 2008-2013 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum pemerintah, program pembangunan daerah serta sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan dan satu tahun masa transisi. Dengan demikian RPJMD Kota Baubau menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah kota Baubau tak terkecuali pemerintah kecamatan Betoambari.

Dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan, maka dirumuskan misi Kecamatan Betoambari sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya Pengelolaan administrasi perkantoran dengan baik dikecamatan maupun dikelurahan;
- 2) Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, transparan dalam prosedur, dan adil;
- 3) Meningkatkan fasilitas penunjang pelayanan baik di kecamatan maupun kelurahan/desa;
- 4) Menciptakan perencanaan strategis, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian, melibatkan partisipasi masyarakat dalam skala pembangunan.

Berdasarkan data dari pemerintah kecamatan Betoambari diketahui bahwa kesesuaian antara factor kunci keberhasilan dengan misi, maka dapat dirumuskan tujuan, sasaran dan kinerja Renstra pemerintah kecamatan Betoambari adalah seperti dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.
Sasaran-sasaran Strategis pada Rencana Strategis
pemerintah kecamatan Betoambari tahun 2013-2018.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1.	Menghasilkan pegawai dan aparatur yang mampu bekerja secara profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	Meningkatkan system administrasi perkantoran yang baik	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan kebutuhan administrasi kantor • Sarana dan prasarana penunjang administrasi perkantoran
2.	Menghasilkan disiplin aparatur agar mampu bekerja secara professional dan akuntabel.	Meningkatkan disiplin aparatur agar mampu bekerja secara professional dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat disiplin aparatur dalam bekerja • Seragam PDH, Linmas untuk pegawai
3.	Memberikan kejelasan	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi

	prosedur kepada masyarakat terhadap pelayanan publik	kecamatan Betoambari mendapatkan informasi secara akurat	public <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan informasi
--	--	--	--

Sumber : LAKIP Pemerintah Kec. Betoambari, 2013

Tingkat capaian kinerja pemerintah kecamatan Betoambari tahun 2013 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel 11 sebagai berikut :

Tabel 2.

Tingkat capaian kinerja pemerintah kecamatan Betoambari tahun 2013

No	Sasaran	Indikator sasaran	satuan	Target	Realisasi	Pencapaian Rencana Target	Ket
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan efektif	Jumlah seksi yang belum memenuhi standar pelayanan administrasi perkantoran yang baik	%	100	90%	100	Baik
2.	Meningkatnya sarana dan parasarana	Jumlah aparatur tiap seksi dan sub bagian belum mendapatkan sarana dan parasarana yang memadai dan mendukung kearah pelayanan yang baik	%	100	93%	100	Baik
3.	Meningkatnya disiplin aparatur	Jumlah perlengkapan yang menunjang disiplin aparatur kec. Betoambari	%	91%	100		Baik
4.	Meningkatnya system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan keuangan selama 1 tahun terbagi kedalam perencanaan semesteran dan akhir tahun	%	100	92,23 %	100	Baik
5.	Meningkatnya dokumen perencanaan	Jumlah laporan perencanaan selama 4 triwulan yang meliputi , LAKIP, Tapkin, Renstra, RKA, DPA	%	100	78,23 %	100	Sangat baik
6.	Meningkatnya perencanaan	Sosialisasi Kebijakan	%	100	100%	100	Sangat baik
7.	Meningkatnya pelayanan administrasi	Jumlah masyarakat yang memiliki KTP	%	100	90%	100	Baik

	kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	sudah sesuai aturan yang ditetapkan					
--	---	-------------------------------------	--	--	--	--	--

Sumber : LAKIP Pemerintah Kec. Betoambari, 2013

Penetapan kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang penetapan kinerja. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Tabel 3.
Penetapan Kinerja Tingkat
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Betoambari tahun 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/kegiatan
Meningkatkan Pelayanan Administrasi yang baik dan efektif	Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan baik dan efektif	Kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi selama satu tahun	Pelayanan administrasi perkantoran : Penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan komunikasi ke luar daerah.
Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Kebutuhan sarana dan prasarana tugas aparatur terpenuhi	Tugas-tugas aparatur terlaksana dengan baik selama satu tahun	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur : Pengadaan mobiler, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, kendaraan dinas/operasional, Bahteramas/dana block grant kelurahan dan kecamatan
Meningkatnya disiplin aparatur	Semua aparatur dapat melaksanakan tugas dan fungsinya	Tidak ada aparatur yang melalaikan tugas dan fungsinya selama satu tahun	Peningkatan disiplin aparatur : Pengadaan pakaian dinas beserta dinas beserta perlengkapannya
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Semua pejabat eselon memahami tugas dan fungsi jabatannya	Semua pejabat eselon dapat melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya dengan baik selama satu Th	Peningkatan kapasitas sumber daya : Pendidikan dan pelatihan, penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan SKPD

Sumber : LAKIP Kecamatan Betoambari, 2013

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah kecamatan Betoambari tahun 2014 telah ditetapkan dan sedang diimplementasikan. Penetapan kinerja tahunan ini telah mengacu pada rencana strategis kecamatan Betoambari yang menterjemahkan RPJMD kota Baubau tahun 2013-2018 untuk membantu mewujudkan visi Walikota Baubau tahun 2013-2018 dengan menetapkan kinerja tahunan. Pemerintah kecamatan Betoambari sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah kota Baubau telah merencanakan strategi-strategi yang dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2013-2018 dan menetapkan kinerja tahunan yang disusun dengan menggunakan indikator-indikator kinerja utama dan target capaian kinerja tahunan atas pelaksanaan sasaran-sasaran strategi dari program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Analisis SWOT

Untuk merealisasikan rencana strategis pemerintah kecamatan Betoambari yang meliputi visi dan misi, tujuan dan sasaran-sasaran strategis serta pencapaian target dan program/kegiatan tahunan pemerintah kecamatan Betoambari, diharapkan pemerintah Kecamatan Betoambari dapat merumuskan strategi yang tepat dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di kecamatan Betoambari yang diperoleh melalui tahapan proses perencanaan manajemen strategis berbasis analisis lingkungan instansi pemerintah kecamatan Betoambari sehingga dapat mengorganisasikan informasi kualitatif dan informasi kuantitatif dalam membuat keputusan yang efektif terkait penyusunan rencana strategis pemerintah kecamatan Betoambari. Proses manajemen strategis ini didasarkan pada keyakinan bahwa instansi pemerintah kecamatan Betoambari seharusnya terus-menerus memonitor peristiwa dan kecenderungan internal dan eksternal sehingga melakukan perubahan yang tepat waktu. Dengan menggunakan manajemen strategis sebagai suatu kerangka kerja (*frame work*) untuk menyelesaikan masalah strategis di dalam instansi pemerintah kecamatan Betoambari, maka organisasi diajak berpikir lebih kreatif dan strategis yang dibangun dari analisa yang lebih teliti akan lebih menjamin suatu hasil yang menguntungkan.

Tujuan dari analisis lingkungan strategi adalah untuk mengetahui pengaruh-pengaruh kunci serta pemilihan strategi apa yang sesuai dengan tantangan yang datangnya dari lingkungan. Melalui penilaian lingkungan internal dan eksternal yang efektif akan menghasilkan informasi yang sangat penting bagi kelangsungan dan kemajuan organisasi. Sebagaimana diketahui bahwa institusi/organisasi tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya dan selalu dihadapkan pada kondisi lingkungan yang selalu beraneka ragam.

Melalui pendapat diatas, Pemerintah Kecamatan Betoambari perlu mengidentifikasi faktor-faktor internal untuk dapat menangkap peluang dan menghindari/mengatasi ancaman yang berasal dari lingkungan internal dan eksternal untuk selanjutnya dapat diketahui isu-isu yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Betoambari dalam rangka menemukan strategi pemerintahan yang tepat dalam

mewujudkan mandat, visi dan misi pemerintah kecamatan Betoambari dalam mendukung Visi Kota Baubau tahun 2013-2018. Oleh karenanya, hendaknya penetapan kinerja tahunan khususnya penetapan kinerja tahun 2014 satuan perangkat kerja daerah pemerintah kecamatan Betoambari kota Baubau lahir dari suatu proses perencanaan manajemen strategic yang berbasis analisis lingkungan yang mengitari dan dapat mempengaruhi kinerja pemerintah kecamatan sebagai unit kerja pemerintah kota Baubau yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan Betoambari.

Kajian lingkungan strategis ditinjau dari aspek lingkungan eksternal instansi pemerintah kecamatan Betoambari yaitu komponen sosial budaya, komponen ekonomi, komponen teknologi dan komponen politik.

Perubahan gaya hidup dapat diartikan sebagai suatu perubahan yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat dalam pemenuhan akan kebutuhan hidup. Setiap perubahan ini tercermin dari kenyataan hidup golongan masyarakat yang ada di Kecamatan Betoambari. Berdasarkan karakteristik Kecamatan Betoambari sekarang ini, telah banyak mengalami peningkatan baik dibidang ekonomi, sosial, budaya maupun pendapat perkapitanya. Keberhasilan ini disebabkan pengaruh tingkat pemahaman masyarakat dalam mengolah dan mendistribusikan hasil-hasil tanaman pangan, hortikultura, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri dan perdagangan, transportasi, komunikasi dan pariwisata. Perubahan gaya hidup yang baik ini tidak lepas dari peranan Pemerintah Kecamatan Betoambari dalam mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk selalu berkarya.

Partisipasi masyarakat terhadap kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Betoambari saat ini berupa kerja bakti disetiap lingkungan RW/RT. Kerja bakti merupakan Program Pemerintah Kecamatan yang dijabarkan keseluruh Pemerintahan Kelurahan yang dimotori oleh tokoh masyarakat bersama ketua Rw/Rt. Dari hasil kerja bakti masal ini memperlihatkan kondisi lingkungan Kecamatan Betoambari yang bersih, indah dan bebas dari sampah. Dengan adanya program Pemerintah ini, membawa dampak positif terhadap Pemerintahan yang ada di Kecamatan Betoambari.

Keluarga berencana merupakan suatu program pemerintah Kecamatan bersama Unit Pelaksana Teknis Dinas BKKBN kota Baubau dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. Dari data yang diperoleh bahwa hampir seluruh masyarakat khususnya Pasangan Usia Subur (PUS) peserta aktif yang berdasarkan kelurahan dan jalur pelayanan tahun 2013 yang terdiri dari pemerintah dan swasta yang ada di Kecamatan Betoambari berjumlah 1589 pasangan yang tersebar di 5 (lima) kelurahan yaitu kelurahan sulaa sebanyak 219 pasangan, kelurahan waborobo sebanyak 98 pasangan, kelurahan lipu sebanyak 607 pasangan, kelurahan katobengke 572 pasangan dan kelurahan labalawa sebanyak 93 pasangan. Pasangan Usia Subur (PUS) tersebut sudah mengenal akan program keluarga berencana. Hal ini dapat dilihat pada menurunnya tingkat kelahiran anak dan kepedulian dari ibu-ibu dalam mempergunakan alat kontrasepsi. Dari data yang ada bahwa sudah 90% Pasangan Usia Subur di Kecamatan Betoambari yang telah mengenal/menggunakan alat kontrasepsi

yang diperoleh di tempat pelayanan kesehatan yang ada di kecamatan Betoambari yaitu rumah sakit, puskesmas, posyandu, polindes dan poskesdes. Dengan data ini mengindikasikan wujud kepedulian masyarakat Kecamatan Betoambari khususnya Pasangan Usia Subur terhadap program pemerintah.

Menurut data yang diperoleh dari pemerintah kecamatan Betoambari, masyarakat kecamatan Betoambari umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani yang bekerja disektor pertanian dan perkebunan, nelayan yang berkerja pada sektor perikanan, buru industri ringan dan industri kecil yang berkerja disektor industri, pedagang, sektor jasa, PNS, TNI/Polri dan pengusaha. Prosentasi penduduk dilihat dari mata pencaharian pokok memperlihatkan 40% penduduk berprofesi sebagai Petani (termasuk buruh tani dan Petani Penggarap), 5% penduduk berkerja sebagai nelayan, 5% penduduk berprofesi sebagai buruh (termasuk buruh bangunan dan buruh industri), 15% penduduk berprofesi sebagai pelayan jasa transportasi, 35% dibagi dalam beberapa profesi sebagai Pegawai, Guru, TNI/POLRI, Pengusaha dan lain-lain. Kecamatan Betoambari yang merupakan salah satu sentra penghasil pertanian, perkebunan, sektor perdagangan dan jasa, hortikultural serta perikanan di kota Baubau yang menyediakan lapangan kerja yang cukup besar. Dari hasil pertanian, perkebunan, hortikultural serta perikanan penduduk kecamatan Betoambari dijual/didistribusikan di pasar-pasar yang ada di kota Baubau.

Sektor konstruksi/bangunan merupakan sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2012, yaitu mencapai 19,30% diikuti sektor listrik, gas dan air bersih (18,34%) dan sektor pertambangan dan penggalian (17,06%) dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 9,86%. Sementara, pada tahun 2013, sektor pembentuk PDRB Kota Baubau yang mempunyai laju pertumbuhan tertinggi adalah sektor konstruksi/bangunan (15,03%) dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (9,88%), diikuti oleh sektor listrik, gas dan air bersih (9,24%), sektor pengangkutan dan komunikasi (7,91%) dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 7,74%.

Dengan kecilnya kontribusi sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan pada laju pertumbuhan sektoral pembentuk PDRB kota Baubau selama kurun waktu 2012-2013, ini tak terlepas dari kurangnya partisipasi masyarakat kota Baubau khususnya masyarakat yang ada di kecamatan Betoambari, untuk itu peran pemerintah kecamatan Betoambari dalam mendorong masyarakat untuk lebih giat lagi dalam memanfaatkan peluang berusaha pada sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan ini.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dibidang sosial, pemerintah kecamatan Betoambari telah mengupayakan berbagai usaha guna tercapainya kesejahteraan masyarakat dan tercapainya harapan hidup masyarakat kecamatan Betoambari, usaha tersebut meliputi kegiatan-kegiatan dibidang kesehatan dan keluarga berencana antara lain penyediaan sarana dan parasarana kesehatan yang ada dikecamatan Betoambari yang dapat memberikan layanan kesehatan masyarakat menurut jenis penyakit ditempat pelayanan.

Menurut data yang diperoleh dari pemerintah Kecamatan Betoambari dapat diketahui bahwa banyaknya tenaga kesehatan menurut spesialisasi yang tersebar dalam kecamatan Betoambari adalah 65 orang dengan rincian yaitu seorang dokter umum dan 2 orang dokter gigi, 21 orang perawat/mantra kesehatan, 17 orang bidan serta 22 orang tenaga kesehatan lainnya, sedangkan tempat pelayanan kesehatan yang ada di kecamatan Betoambari yaitu terdapat 3 buah Puskesmas (berada dikelurahan Katobengke, Waborobo, Sulaa), 2 puskesmas pembantu, 17 Posyandu, 3 Polindes dan 2 Poskesdes.

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa 90% Pasangan Usia Subur (PUS) sudah mengenal akan program ini. Hal ini lebih berpengaruh terhadap tingkat rata-rata kelahiran bayi yang sudah sesuai dengan kebijakan Pemerintah, dengan program Keluarga Berencana melalui pemberian imunisasi vaksin BCG, DPT 1, DPT II, DPT III kepada bayi dan balita agar terhindar dari penyakit polio dan campak, maka tingkat harapan hidup bayi akan maksimal. Dengan tingkat rata-rata kelahiran bayi yang baik serta tingkat harapan hidup yang maksimal merupakan wujud peran serta Pemerintah dalam peningkatan kesehatan khusus bayi, ibu dan anak.

Ditunjang dengan besarnya lahan Pertanian yang ada di Kecamatan Betoambari sehingga member kesempatan bagi masyarakat (Petani) untuk dapat mengerjakan lahan yang ada dan penciptaan peluang-peluang usaha ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah kota Baubau khususnya disektor perdagangan dan jasa. maka dengan demikian pendapatan penduduk Kecamatan Betoambari secara signifikan akan meningkat dan dari pendapatan yang dihasilkan ini melebihi dari kebutuhan hidup rata-rata keluarga.

Dengan terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat lewat pendapatan penduduk yang melebihi kebutuhan hidup rata-rata keluarga mencerminkan bahwa program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah Kecamatan Betoambari dianggap berhasil.

Investasi yang saat ini yang telah dilakukan di wilayah Kecamatan Betoambari tepatnya di kelurahan Sula yaitu investasi pembangunan Depot pengisian BBM transit Indonesia timur yang dilakukan oleh Pertamina yang diharapkan dengan adanya investasi ini akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan akan memberikan kontribusi khususnya pajak terhadap Pemerintah.

Penelitian dan Pengembangan khusus dibidang teknologi saat ini di Kecamatan Betoambari tidak ada. Hal ini disebabkan karena tidak adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah untuk mengelola potensi-potensi di bidang teknologi yang ada di Kecamatan Betoambari dalam melakukan penelitian dan pengembangan. Total pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan tidak ada, mengingat dampak hasil yang diperoleh nanti dari adanya Penelitian dan Pengembangan sangat berarti, mengharuskan Pemerintah Kecamatan Betoambari supaya mampu merealisasikannya di Kecamatan Betoambari.

Sektor industri merupakan sektor utama dalam roda perekonomian suatu daerah. Di Indonesia penggolongan industri di bagi menjadi empat kelompok yaitu

industri besar, industri sedang dan industri kecil serta industri rumah tangga. Berdasarkan data dari pemerintah kecamatan Betoambari dapat diketahui bahwa perkembangan industri menurut kelompok industri terdapat industri sedang (tenaga kerja 20-99) sebanyak 5 perusahaan dengan tenaga kerja 115 orang, industri kecil (tenaga kerja 5-19) berjumlah 27 perusahaan dengan tenaga kerja 153 orang dan industri kecil (tenaga kerja 72-119) berjumlah 72 perusahaan dengan tenaga kerja 119 orang.

Keberadaan industri di kecamatan Betoambari belum sepenuhnya didukung dengan peningkatan teknologi industri yang memadai dan kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh warga padahal dari sektor industri setidaknya bisa memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat dan dapat memberikan kontribusi perkembangan PDRB bagi Pemerintahan.

Upaya-upaya yang diberikan oleh pemerintah untuk peningkatan teknologi di Kecamatan Betoambari berupa pemberian bantuan peralatan teknologi/pertanian dan industri. Bantuan inipun merupakan sumbangan dari Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara. Dengan peralatan ini setidaknya dapat membantu Pemerintah Kecamatan Betoambari dalam penyelesaian Administrasi di Kantor Camat (bantuan berupa peralatan teknologi). Sementara bagi petani dapat mengolah lahan pertaniannya dan kegiatan industrinya dengan menggunakan alat pertanian dan industri modern, dimana sebelumnya hanya mengandalkan alat-alat pertanian dan industri manual.

Peran serta Pemerintah Kecamatan Betoambari dalam pengembangan transfer teknologi adalah pada unsur pengawasan/pemantauan. Transfer teknologi dapat berupa pengetahuan-pengetahuan baru terhadap perkembangan teknologi yang ada saat ini/ yang beredar. Melalui pengawasan/pengamatan terhadap transfer teknologi ini, akan lebih memberi input terhadap bagaimana teknologi yang berkembang saat ini.

Menurut pengamatan yang ada bahwa di Kecamatan Betoambari tidak memiliki industri teknologi. Dengan demikian perbaikan produktivitas teknologi tidak ada. Apabila di Kecamatan Betoambari memiliki produktivitas teknologi untuk perbaikannya adalah mendorong/memotivasinya selama produk itu memiliki jaminan hukum, sehingga mengarah pada perkembangan bagi produktivitas teknologi itu sendiri maupun dalam perkembangan Kecamatan Betoambari secara umum.

Perkembangan teknologi yang semakin canggih dewasa ini, dikaitkan dalam pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintahan di Kecamatan Betoambari. Pemerintah Kecamatan Betoambari hanya memiliki satu unit laptop komputer dan pesawat telepon kantor, pesawat HT, felling cabinet. Dalam pemanfaatannya sangat besar terhadap kesinambungan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah melalui penambahan alat-alat teknologi seperti faximili, internet dan lain-lain akan lebih memperlancar/mempermudah dalam penyelesaian seluruh tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan Betoambari.

Pelaksanaan Pemerintahan di Kecamatan Betoambari didasarkan pada peraturan yang berlaku (UU, Perda, PP dan sebagainya). Relevansi terhadap peraturan-

peraturan yang ada/ yang berlaku pada umumnya berjalan dengan baik (mengikuti peraturan yang telah ditetapkan). Sebagaimana contoh mandat yang diemban oleh Pemerintah Kecamatan Betoambari yang didasarkan pada perda Kota Baubau No. 4 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Baubau No. 44 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan Kota Baubau, jika pada akhirnya Pemerintah Kecamatan Betoambari tidak berpatokan pada Perda dan Peraturan Walikota tersebut, dengan demikian Pemerintah Kecamatan Betoambari akan mengalami kegagalan dalam pelaksanaan Pemerintahan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor pelayanan pajak kota Baubau tahun 2013, terlihat jumlah wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ada di kecamatan Betoambari sebanyak 6.077 wajib pajak dengan pokok sebesar 466.381 Ribu Rupiah dan realisasi sebesar 181.535 Ribu Rupiah dengan persentase 38,9%.

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa banyaknya penunggak pajak, nilai tunggakan dan persentasenya, dimana terlihat bahwa terdapat 3420 penunggak dengan nilai tunggakan 284.843 Ribu Rupiah. Untuk penunggak terbanyak terdapat di kelurahan Katobengke sebanyak 1.742 penunggak dengan nilai tunggakan 158.145 Ribu Rupiah.

Dari hasil penagihan pajak di Kecamatan Betoambari, prosentasi penerimaan paling tinggi hanya sebesar 38,9% . Ini berarti kepedulian masyarakat Kecamatan Betoambari dalam membayar pajak sangat kurang. Untuk itu diperlukan terobosan-terobosan baru dalam melakukan yang harus dilakukan oleh pemerintah kecamatan Betoambari, untuk memperoleh pajak 100%,

Lingkungan Internal

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM pada kantor Camat Betoambari belum terlalu memadai karena dari latar pendidikan yang diikuti dan dari data memperlihatkan bahwa dari seluruh pegawai yang ada, hanya Camat dan Sekretaris serta kepala seksi pemerintahan yang telah mengikuti diklat.

Meskipun demikian, Pemerintah Kecamatan Betoambari juga masih memiliki kualitas tersendiri, dimana bila melihat tingkat pendidikan dan pengalaman kerja yang sangat menjanjikan. Kualitas pegawai berdasarkan jabatan Camat/ Eselon III A berjumlah 1 orang, Sekretaris kecamatan Eselon III B berjumlah 1 orang, Kepala seksi/Eselon IV A sebanyak 5 orang, kepala sub bagian/Eselon IV B sebanyak 2 orang dan staf pelaksana sebanyak 16 orang. Sedangkan kondisi kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan terdiri dari golongan IV sebanyak 2 orang, golongan III sebanyak 20 orang dan golongan II sebanyak 3 orang, sedangkan kondisi kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan, dimana pegawai yang ada rata-rata memiliki latar belakang Ijasah Sarjana/SI sebanyak 12 orang, sementara yang terendah memiliki ijazah SMA/ sederajat sebanyak 13 orang. Diakui bahwa di dalam perencanaan dan pengembangan karir pegawai, Pemerintah Kecamatan Betoambari memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pegawainya untuk berinovasi selagi tidak melampaui batas hak-haknya sebagai Pegawai Negeri, semuanya dikembalikan kepada

Pemerintah Kecamatan Betoambari karena semua bentuk program pelatihan dan pengembangan karir pegawai disesuaikan menurut program yang ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Betoambari.

Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan haruslah didukung dengan sistim/ mekanisme anggaran Pemerintah Kecamatan Betoambari dalam pelaksanaan tugasnya selalu didukung oleh anggaran/ dana. Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah kecamatan Betoambari dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dan kinerja kecamatan Betoambari tahun 2013 adalah pagu tahun 2013 adalah sebesar Rp. 3,941,776,180,- (Tiga milyar Sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam ribu seratus delapan puluh rupiah), dengan realisasi anggaran belanja langsung pada per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 3,541,188,874,-(Tiga milyar lima ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh empat) atau 89,84% dari pagu anggaran. Dalam proses/penyusunan anggaran dimulai dengan membuat perincian anggaran yang dibutuhkan melalui penetapan kinerja tahunan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada yang mengacu pada renstra kecamatan Betoambari serta RJMD tahun 2013-2018, kemudian diajukan melalui instansi yang berwenang pada Pemerintah Kota Baubau. Namun demikian sangatlah disayangkan , pengalokasian anggaran sering tidak sesuai penggunaannya, walaupun ada laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kecamatan Betoambari setiap akhir tahun anggaran, Perealisasian anggaran tidak transparan/ terbuka dan ini dilakukan oleh oknum tertentu.

Merupakan suatu kebanggaan bila laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kecamatan Betoambari sebagai wujud terciptanya pelayanan kepada masyarakat secara umum dan laporan atas pelaksanaan kegiatan, program dan arah kebijakan yang telah disetujui dilaksanakan sesuai dengan pos anggaran yang telah ditentukan dan karena akan berimplikasi pada ketidاكلancaran tugas-tugas umum pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pengolahan informasi/ data pada Pemerintah Kecamatan Betoambari, belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan karena kinerja aparat yang kurang bertanggung jawab dalam tugas yang diberikan. Ini merupakan kelemahan yang harus disigapi oleh Pemerintah Kecamatan Betoambari dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan.

Ketersediaan sarana dan prasarana akan memberikan kontribusi positif penyelenggaraan pemerintahan yang ada apabila ditunjang dengan memadainya ketiga unsur ini. Sesuai dengan data yang ditemukan bahwa kemampuan aparat Pemerintah Kecamatan Betoambari pada dasarnya mampu menjalankan tugas yang diberikan tetapi masalah kedisiplinan yang masih dirasakan kurang, seperti masalah kehadiran, kerapian dalam menggunakan seragam, keikut sertaan dalam mengikuti apel pagi dan sore, sering terlambat dan lain-lain. Sementara dari alat-alat penunjang yang ada berupa gedung kantor yang dipakai sekarang sudah tidak layak lagi karena sudah rusak. Begittu juga peralatan mobiler seperti meja, kursi dan papan pengumuman sudah pada rusak .

Kultur atau budaya merupakan gambaran dari sistim atau seperangkat nilai. Seperangkat tersebut diaktualisasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh setiap anggota dari sebuah organisasi yang dinamakan Birokrasi. Keberadaan Pemerintah Kecamatan Betoambari tidak lepas dari pengaruh faktor budaya. Faktor budaya itu dapat berupa hubungan antar pegawai, kepemimpinan dan teknik pengambilan keputusan. Pada dasarnya pola hubungan antara pegawai pada Pemerintah Kecamatan Betoambari sangat baik. Sementara modal kepemimpinan yang ada khususnya pada pribadi pegawai yang ada, belum terlalu memperlihatkan akan bagaimana seorang pemimpin yang baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kedisiplinan pegawai yang relative kecil terhadap kapasitasnya sebagai aparatur. Sedangkan dalam teknik pengambilan keputusan pada Pemerintah Kecamatan Betoambari, hanya dilakukan oleh pegawai yang menduduki jabatan seperti Camat, sekretaris Kecamatan, dan kepala seksi, sementara staf tidak dilibatkan hanya sebagai pelaksana keputusan.

Berangkat dari hasil analisa dan sintesa yang dibangun penggunaan teknik analisa SWOT dalam mengidentifikasi factor-faktor dari lingkungan internal dan eksternal pemerintah kecamatan Betoambari dalam rangka analisis strategi pada Renstra pemerintah kecamatan Betoambari berbasis manajemen strategik terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.
Identifikasi faktor-faktor Eksternal dan Internal
Pemerintah Kecamatan Betoambari

NO	Faktor Eksternal	No	Faktor Internal
	Peluang		Kekuatan
1	Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat	1	Tersedianaya anggaran yang memadai
2	Partisipasi masyarakat yang tinggi berupa kerja bakti sosial dilingkungan masing-masing.	2	Proses Perencanaan Kegiatan Program yang tersusun dengan baik
3	Kesadaran masyarakat terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Berencana	3	Hubungan antar pegawai yang tertata dengan baik
4	Pertumbuhan penduduk yang sebanding terhadap lahan pekerjaan yang tersedia	4	Proses pengorganisasian dalam hal pembangian kerja penempatan pegawai, mekanisme organisasi dan kelompok kerja yang baik
5	Besarnya jumlah kuantitas penduduk produktif	5	Sistim koordinasi organisasi yang baik
6	Terpeliharanya kerukunan antar umat beragama	6	Sistim evaluasi/ kontrol organisasi yang baik
7	Tingginya perlindungan terhadap Hak Cipta oleh Pemerintah Kec. Betoambari	7	Tersedianya sarana penampung aspirasi dalam bentuk saran, kritik dan keluhan dari masyarakat
8	Relevansi Pelaksanaan peraturan perundang-undangan sesuai prosedur	8	Penyelesaian segala bentuk persoalan yang dialamatkan pada Pemerintah Kec.

			Betoambari secara kontinyu
		9	Pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi yang dijalankan sesuai peraturan yang berlaku
		10	Tertatanya mekanisme penyampaian LPJ pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan
		11	Penegakan disiplin bagi Pegawai/ Aparatur
		12	Penyelesaian semua bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan Pemerintahan
		13	Kejelasan Visi dan Misi
	Ancaman		Kelemahan
1	Pendapatan Per Kepala Keluarga yang belum sebanding dengan masyarakat Kec. Sekitarnya	1	Kurangnya kualitas SDM Pemerintah Kecamatan Betoambari
2	Kondisi Kamtibmas yang kurang memadai	2	Minimnya gaji/tunjangan/intensif pegawai
3	Kurangnya alat-alat/ Potensi teknologi	3	Realisasi anggaran yang tidak sesuai/tidak transparan
4	Tidak adanya produk-produk teknologi baru	4	Struktur Organisasi yang tidak solid (masih banyaknya pegawai berpendidikan SLTA/ dan masih minim mengikuti diklat)
5	Kurangnya kepedulian masyarakat dalam membayar pajak	5	Sistim informasi yang kurang memadai
6	Tingginya suhu perpolitikan di Kecamatan Betoambari	6	Kurangnya tingkat kedisiplinan pegawai/ aparaturnya
		7	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang
		8	Kurangnya tingkat kesadaran pegawai terhadap Tupoksi
		9	Pemberian layanan yang tidak adil bagi pengguna jasa layanan (Orientasi pelayanan belum memadai)

Sumber : Data diolah, 2014

Temuan Isu Analisis strategis pada rencana strategis pemerintah kecamatan Betoambari dengan Menggunakan Teknik Matriks SWOT.

Mengidentifikasi isu-isu strategis adalah jantung dalam proses perencanaan strategis. Dari keseluruhan hasil analisis yang dilakukan diatas yang berfokus pada teknik analisis SWOT, maka dapat isu-isu strategis yang ditemukan berdasarkan elaborasi dan analisis terhadap fakta yang ada . Selanjutnya dari hasil identifikasi isu-isu strategis ini, diselaraskan kedalam Matriks SWOT dengan teknik silangan matriks SWOT untuk mendapatkan isu analisis strategi yang tepat yaitu Strategi SO (*Strength Opportunity Strategy*) yaitu strategi memanfaatkan kekuatan untuk mengisi peluang, Strategi ST(*Strength Threat Strategy*) yaitu strategi memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman, Strategi WO (*Weakness Opportunity Strategy*) yaitu strategi memperbaiki kelemahan dengan memanfaatkan peluang dari luar dan Strategi WT

(Weakness Threat) strategi meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman yang datang dari lingkungan luar instansi pemerintah kecamatan Betoambari. Strategi tersebut sebagaimana diilustrasikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.
Silangan Matriks SWOT

EFAS	Peluang		Ancaman	
	A.1	Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat	B.1	Pendapatan per Kepala Keluarga yang belum sebanding dengan Masyarakat Kec. Sekitarnya
	A.2	Partisipasi masyarakat yang tinggi berupa kerja bakti sosial dilingkungan masing-masing RT/RW	B.2	Kondisi Kamtibmas yang kurang memadai
	A.3	Kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan Program KB	B.3	Kurangnya alat-alat/Potensi Teknologi
	A.4	Pertumbuhan Penduduk yang sebanding terhadap lapangan pekerjaan yang tersedia	B.4	Tidak adanya Produk-produk Teknologi baru
	A.5	Besarnya jumlah kuantitas penduduk produktif	B.5	Kurangnya kepedulian masyarakat dalam membayar Pajak
	A.6	Terpeliharanya kerukunan antar umat beragama	B.6	Tingginya suhu perpolitik di Kecamatan Betoambari
	A.7	Tingginya perlindungan Hak Cipta oleh Pemerintah Kec. Betoambari		
	A.8	Relevansi pelaksanaan peraturan perundang-undangan sesuai prosedur		

IFAS					
Kekuatan		Strategi Memanfaatkan Kekuatan dan Mengisi Peluang		Strategi Memanfaatkan Kekuatan dan Mengatasi Ancaman	
C1	Tersedianya anggaran yang memadai	1	Mengintensifkan potensi Pemerintahan yang ada C1 sampai C13 VS A1 sampai A)	1	Melakukan pengembangan Industri dan Teknologi di Tingkat Kec. (C1,C13 VS B3,B4.
C2	Proses Perencanaan Kegiatan/Program yang tersusun dengan baik	2	Mendorong penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang Akuntabel, Transparan, Responsif dan menghargai Supremasi Hukum (C7,C9,C10,C13 VS A6, A7)	2	Mendorong kemampuan /partisipasi dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan (C1,C13 VS B1,B6,B7)
C3	Hubungan antar pegawai yang tertata baik				
C4	Proses pengorganisasian dalam hal pembagian kerja, penempatan				

	pegawai, mekanisme organisasi dan kelompok kerja yang baik			
C5	Sistim Koordinasi organisasi yang teratur			
C6	Sistim evaluasi/kontrol organisasi yang baik			
C7	Tersedianya sarana penampung aspirasi dalam bentuk saran, kritik dan keluhan dari masyarakat			
C8	Penyelesaian segala bentuk persoalan yang dialamatkan pada pemerintah kecamatan Betoambari secara kontinyu			
C9	Pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi yang dijalankan sesuai peraturan yang berlaku			
C10	Tertatanya mekanisme penyampaian LPJ pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan			
C11	Penegakan disiplin bagi Pegawai/Aparatur			
C12	Penyelesaian semua bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan Pemerintahan			
C13	Kejelasan Visi dan Misi			
	Kelemahan (Threat)		Strategi mengatasi Kelemahan dan mengisi peluang	Strategi meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman
D1	Kurangnya kualitas SDM Pemerintah Kec. Betoambari	1	Menata kembali Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Betoambari (D4 VS A1,A2,A8)	1 Menyiapkan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana yang memadai dalam menunjang tercapainya tugas-tugas pemerintahan (D1,D4,D5 VS ,B4,B5)
D2	Minimnya gaji/tunjangan/ insentif pegawai	2	Melakukan Pembinaan Sikap, Mental,Disiplin, Motivasi kerja dan pemahaman para Pegawai terhadap Tupoksi (D1,D6,D8,D9 VS A6, A8)	
D3	Realisasi anggaran yang tidak sesuai/tidak transparan			
D4	Struktur Organisasi yang tidak solid (masih banyaknya aparatur berpendidikan SLTA/ sederajat) dan minimnya diklat)			
D5	Sistim informasi yang kurang memadai			

D6	Kurangnya tingkat kedisiplinan pegawai/aparatur			
D7	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang			
D8	Kurangnya tingkat kesadaran pegawai terhadap Tupoksi			
D9	Pemberian layanan yang tidak adil bagi penggunaan jasa layanan (orientasi pelayanan belum memadai)			

Sumber : Data diolah, 2014

Setelah analisis isu strategis yang dihadapi oleh Organisasi berhasil diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah merumuskan strategi yang tepat untuk mengatasi isu-isu tersebut. Dari tujuh isu strategis yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Betoambari, didapatlah empat analisis isu strategis yang dinilai paling strategis yang ditentukan berdasarkan urutan prioritas, logis ataupun temporal. Keempat analisis isu strategis yang dapat dijadikan tujuan dan sasaran strategis dalam penetapan kinerja tahunan adalah sebagai berikut :

Strategi Pengintensifan Potensi Pemerintahan

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Betoambari yang juga merupakan Tokoh Masyarakat, yang mengatakan bahwa Pemerintahan yang sementara berjalan saat ini di Kecamatan Betoambari pada dasarnya masih dalam tahap mengarah pada sistim pemerintahan yang baik. Melalui pendapat ini mengindikasikan bahwa pada dasarnya Pemerintahan Kecamatan Betoambari belum mencerminkan sistim Pemerintahan yang baik. Meskipun demikian disatu sisi bahwa Pemerintah Kecamatan Betoambari masih memiliki potensi yang ada dalam pemerintahan berupa kontribusi positif yang dapat diberikan lewat pelayanan yang ada Potensi pemerintahan yang ada ini bukan tidak mungkin akan hilang apabila tidak diintensifkan. Dengan adanya faktor peluang yang dimiliki oleh pemerintah Kecamatan Betoambari dan didukung oleh faktor kekuatan, memungkinkan terlaksananya strategi ini.

Strategi ini sangat tepat dikembangkan oleh Pemerintah Kecamatan Betoambari karena ditunjang dengan tersedianya anggaran yang memadai, proses perencanaan kegiatan yang disusun dengan baik, penegakan disiplin pegawai dan penyelesaian semua bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintahan.

Strategi Penyiapan SDM serta Sarana dan Prasarana yang Memadai dalam Menunjang tercapainya Tugas-Tugas Pemerintahan

Berdasarkan pengamatan bahwa SDM pegawai Kantor Camat Betoambari sangat tidak menunjang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Mengingat volume kerja Pemerintah Kecamatan Betoambari yang begitu besar, sangat memerlukan SDM yang handal. Dalam kenyataan bahwa jumlah pegawai yang hanya 25 orang, latar belakang diklat penjenjangan dan tingkat pendidikan aparatur masih rendah yaitu masih banyak pegawai yang hanya tamat SLTA/Sederajat serta masih banyak aparatur

belum mengikuti diklat. Begitupun dengan sarana dan Prasarana Kantor. Bangunan kantor yang sudah rusak, meja dan kursi, papan pengumuman, terbatasnya computer, tidak adanya internet dan faximili.

Untuk itu, berikut beberapa langkah yang menurut peneliti harus diambil Pemerintah Kecamatan Betoambari untuk memecahkan masalah diatas dicapai dengan cara pertama, melakukan manufer/permohonan kepada Walikota Kecamatan Betoambari dalam rangka memperbaiki/menambah sarana dan prasarana baik bangunan kantor, meja, kursi papan pengumuman, computer, faximili dan internet, kedua memberikan kesempatan bagi pegawai untuk mengikuti diklat penjenjangan. Ketiga menambah personil/pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan Diploma/SI dengan cara mengusulkan pegawai yang ada diluar instansi Pemerintah Kecamatan Betoambari kepada walikota untuk kemudian ditempatkan/ menduduki jabatan pada pemerintah Kecamatan Betoambari. Ini dilakukan dengan catatan bahwa pegawai yang diusulkan telah melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan pemerintah Kecamatan Betoambari.

Strategi Pembinaan Sikap Mental, Disiplin, Motivasi kerja dan Pemahaman Terhadap Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai hasil wawancara yang dilakukan dengan sekteratis Betoambari diperoleh infomasi mengenai tiga hal. Pertama kurangnya tingkat kedisiplinan Pegawai dalam hal kehadiran di Kantor, apel pagi/sore dan cara berpakaian dinas dan perlengkapannya. Kedua, sikap mental pegawai dimana dalam melaksanakan tugas harus dibimbing/dituntun seperti seorang anak kecil (tidak ada motivasi kerja). Ketiga, banyaknya pegawai yang tidak mengerti/ kurangnya tingkat kesadaran terhadap tupoksi.

Untuk itu beberapa langkah yang perlu diambil oleh Pemerintah Kecamatan Betoambari dalam memecahkan masalah diatas, yaitu dengan cara meningkatkan motivasi kerja pegawai dengan cara memberikan imbalan bagi yang berprestasi, memberikan pujian, mengajukan kepada Pemerintah Kecamatan Betoambari bagi pegawai yang disiplin dalam hal promosi jabatan, maupun kesempatan melanjutkan pendidikan dan cara lain dengan memberikan sanksi/tindakan disiplin (sesuai peraturan yang berlaku) bagi pegawai yang telah nyata melakukan pelanggaran.

Strategi Mendorong Kemampuan/Partisipasi dan Kemandirian masyarakat untuk Berperan Aktif dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan

Salah satu faktor penunjang keberhasilan Pemerintah yaitu adanya dukungan positif dari masyarakat. Masyarakat adalah merupakan objek dari Pemerintah. Disamping itu pula sering terjadinya gangguan Kamtibmas serta tingginya suhu perpolitikan. Fenomena inilah yang terjadi di Kecamatan Betoambari. Oleh karena itu, untuk menunjang pelaksanaan pemerintah lewat strategi mendorong kemampuan/partispasi dan kemandirian masyarakat dapat dilakukan melalui kerjasama dengan seluruh pemerintah kelurahan dan tokoh masyarakat melakukan

sosialisasi pengikatan pendapatan Kepala Keluarga serta pentingnya membayar pajak, kerjasama dengan pihak Kepolisian dalam menangani semua bentuk gangguan Kamtibmas dengan sebelumnya memberikan arahan kepada masyarakat mengenai sanksi yang akan diberikan apabila melakukan pelanggaran, serta memberikan penerangan kepada masyarakat untuk tidak menyangkut pautkan antara politik dengan pemerintahan.

Penutup

Berdasarkan teknik analisis SWOT dapat diidentifikasi faktor-faktor eksternal yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Betoambari meliputi peluang (opportunities) yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat. Partisipasi masyarakat yang tinggi berupa kerja bakti, kesadaran masyarakat terhadap program KB, pertumbuhan penduduk yang sebanding terhadap lapangan pekerjaan yang tersedia, besarnya jumlah/kuantitas penduduk produktif, terpeliharanya kerukunan antar umat beragama, tingginya perlindungan terhadap hak Cipta dan relevansi peraturan perundang-undangan sesuai prosedur. Dari segi ancaman (Threats), yaitu pendapatan per kepala keluarga yang belum sebanding dengan masyarakat Kecamatan sekitarnya, kondisi Kamtibmas yang kurang memadai, kurangnya alat-alat/potensi teknologi, tidak adanya produk-produk teknologi baru, kurangnya kepedulian masyarakat dalam membayar pajak dan tingginya suhu perpolitikan di Kecamatan Betoambari.

Berdasarkan teknik analisis SWOT dapat diidentifikasi faktor-faktor Internal yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Betoambari mencakup kekuatan yaitu tersedianya anggaran yang memadai, proses perencanaan kegiatan/program yang tersusun dengan baik, hubungan antar pegawai yang tertata baik, proses pengorganisasian dalam hal pembagian kerja, penempatan pegawai, mekanisme organisasi dan kelompok kerja yang baik, sistem koordinasi yang teratur, sistem evaluasi organisasi yang baik. Tersedianya sarana penampung aspirasi dalam bentuk saran, kritik dan keluhan dari masyarakat, penyelesaian segala bentuk persoalan, Pelaksanaan tupoksi yang dijalankan sesuai peraturan yang berlaku. Tertatanya mekanisme penyampaian LPJ, penegakan disiplin pegawai dan penyelesaian semua bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan Pemerintahan. Dari kelemahan (Weaknesies), yaitu kurangnya kualitas SDM, minimnya gaji/tunjangan/insentif, realisasi anggaran yang tidak sesuai/ tidak transparan, struktur organisasi yang tidak solid (masih banyaknya aparatur berpendidikan rendah yaitu hanya tamat SLTA/sederajat dan kurangnya diklat penjenjangan), sistem informasi yang kurang memadai, kurangnya kedisiplinan pegawai, kurang sarana dan Prasarana, kurangnya tingkat kesadaran pegawai terhadap tupoksi dan pemberian layanan yang tidak adil bagi pengguna jasa.

Daftar Pustaka

Agusra, Yan., 2002, *Peranan Kecamatan dalam Pemerintahan Negeri Pasca UU No. 22 Tahun 1999 di Kabupaten Lima Puluh Kota*, Universitas GadjahMada, Yogyakarta.

- Amirullah, Cantika, Sri, Budi., 2002, *Manajemen Stratejik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Basri, Faisal, H., 2003, *Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi*, Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta.
-, 2013, *Baubau dalam Angka dan Betoambari dalam Angka*, Bappeda Kota Baubau
- Bryson, John, M., 2003. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*, Terjemahan Miftahuddin, M., Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Craig, James, C., dan Grant, Robert, M., 1996, *Manajemen Strategis*, Terjemahan Tjiptowardojo, Sularno, P.T. Elex Media Computindo, Jakarta.
- Dirgantoro, Crown., 2001, *Manajemen Stratejik: Konsep Kasus dan Implementasi*, P.T. Grasindo, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus., 2000, *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*, Jurusan Ilmu Administrasi negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada , Yogyakarta
- Dwiyanto, Agus., et.al, 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, PSKK Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Kaho, Josef, Riwu., 2001, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, P.T, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Keban, Yeremias, T., 2005, *Sesi-Sesi Kuliah Manajemen Strategis*, Magister Administrasi Publik UGM, Yogyakarta.
-, 2013, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Betoambari*, Baubau.
-, 2000. *Indikator Kinerja Pemerintah Daerah, Pendekatan Manajemen dan Kebijakan*, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fisipol Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Kusnadi, Hanafi, Agustina., 1999, *Pengantar Manajemen Strategi*, Universitas Brawijaya Malang, Universitas Sriwijaya Palembang.
- Lay, Cornelis dan peneliti., 2002, *Desentralisasi dan Demokrasi (Kajian tentang Kecamatan sebagai sarana pengembangan Demokrasi, Pelayanan Publik, Ekonomi dan Intermediary)*, Fisipol UGM Yogyakarta.
- Moleong, Lexy., 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Morrisey, George, L., 1997, *Morrisey dan Perencanaan., Pedoman Pemikiran Strategis*, Terjemahan Widiyanto, Gianto, Prent Hallindo, Jakarta.
- Nazir, Mohammad., 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Robbins, Stephen, P., 1994, *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi*, Terjemahan Jusuf Udaya, Arcan, Jakarta.
- Salusu., 1998, *Pengambilan Keputusan Stratejik: Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, P.T, Grasindo, Jakarta.
- Saragih, Juli, Panglima., 2003, *Desentralisasi Fiskal dan keuangan daerah Dalam Otonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Steiner, George. A., dan Miner, John M., 1988, *Kebijaksanaan dan Strategi terjemahan Ticoalu dan Dharma*, Agus, edisi Kedua Erlangga, Jakarta.
- Siagian, Sondang. P., 2000. *Manajemen Stratejik*, P.T. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sutarto, 2000, *Dasar-Dasar Organisasi*, Gadjah Mada University Pres, Yogyakarta.
-, 2008, *Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi SKPD*, Sekretariat Kota Baubau.
-, 2008, *Peraturan Walikota Baubau Nomor 44 tahun 2008 tentang Tugas pokok dan fungsi pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam kota Baubau*, Sekretariat Kota Baubau.
- Tangkilisan, Hessel, Nogi, S., 2003. *Manajemen Modern untuk Sektor Public*, Balairung & CO, Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Utomo, Warsito., 2004, *Sesi-Sesi Kuliah Reformasi Administrasi*, Magister Administrasi Publik UGM, Yogyakarta.
- Wasistiono, Sadu., 2003, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Fokus Media, Bandung.